

Nilai Kesesuaian Produk Non-Makanan dan Produk Makanan Berstandar Nasional Indonesia (SNI) di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan

H.M. Ismail

Program Studi Filsafat Politik Islam

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: *This study aims to: (1) Identify the products that have been standard SNI, (2) Conducting an analysis of the suitability of the product is whether it is feasible to get ISO standards, (3) Provide recommendations which products really fit with the standard status SNI and products which are still less worthy of the status of ISO standard. This research approach is quantitative with survey method. Instruments used in the implementation of a questionnaire survey. The results of this study are as follows: (1) There are clear criteria in determining the SNI products, and information obtained by the parties concerned can be accessed easily, (2) In the two components of the survey, namely non-food products and food products, all respondents said that stakeholders can participate in the development of SNI, (3) There is transparency in the development of SNI ranging from programming and formulation stage to the stage of establishment, (4) On average, respondents said that the stakeholders can give their interests and treated fair, (5) Trading facility provided by the national government in order to standardize considered effective and relevant, (6) There is a connectedness in the development of national standardization. In the two components of the survey contained figure of 2.83 in non-food products and 2,76 on the food products, (7) National standardization program that also consider the public interest and also national interest was also considered by respondents to have dimensions of development, (8) An increasing Index Standard Suitability Test Items from the year 2008-2010, although the range in 2007-2008 has decreased, (9) Index Standard Product Suitability Test in Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan viewed from statistical data presented in general belong to the category of "good", (10) For products already in the survey, referring to the results of statistical data, it deserves to get the label of SNI from stakeholders.*

Keywords: *Indonesian National Standard (SNI), standardization, suitability, non-food product, food product*

Sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Badan Standarisasi Nasional (BSN) mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. Maka kemudian Badan Standarisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan produsen dalam memenuhi standar kualitas. Ini dilakukan untuk menjamin terciptanya proses perdagangan yang adil serta menunjang pertumbuhan produk

nasional dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan keunggulan produk yang kompetitif dalam kancah nasional. Dalam rangka mencapai target, BSN berwenang melakukan uji produk, amandemen penetapan SNI, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung (misal, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 571/KEPIBSN/161/2009, Nomor 03/KEP/BSN/1/2010, Nomor 04/KEP/BSN/1/2010).

Standarisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan

Alamat Korespondensi:

H.M. Ismail, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

kepada masyarakat. Penerapan standarisasi oleh industri menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan strategis, yang mana di antaranya adalah peningkatan daya saing ekspor produk Indonesia, peningkatan daya saing produk Indonesia terhadap produk impor, peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program keterikatan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya.

SNI memberi manfaat tidak hanya bagi konsumen atau masyarakat, melainkan bagi pengusaha produk sendiri. Dengan adanya standar nasional, pengusaha mendapat kepastian batas persyaratan yang harus dipenuhi. Kepastian tersebut secara ekonomis memberikan manfaat bagi pengusaha. Dengan adanya persyaratan SNI, maka perusahaan dapat mengkalkulasi secara lebih pasti biaya produksi untuk produknya. Keuntungan SNI secara ekonomis juga dirasakan oleh negara. Nilai tambah industri atas penerapan SNI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 202,6 triliun atau sekitar 3,61% dari total PDB tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp 5.613 triliun. Kepala Badan Standardisasi Nasional Indonesia, Bambang Setiadi, menyebutkan untuk industri air minum dalam kemasan, keuntungan yang diperoleh mencapai Rp3,4 triliun, minyak goreng mencapai Rp 18,6 triliun, garam beryodium sebesar Rp547 miliar, dan komoditas pupuk sebesar Rp1,4 triliun. Itu hanya untuk 4 produk, belum dengan produk-produk lain (kabarbisnis.com).

Terkait dengan semakin pentingnya fungsi standarisasi nasional ini, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bulan November sebagai bulan produktivitas dan mutu. Ini berawal dari Konvensi Nasional Standarisasi pada tanggal 5–7 November 1991 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Maka seiring dengan berjalannya waktu, Bulan November kemudian diperingati sebagai bulan mutu nasional dan Hari Standar Dunia.

Kegiatan Bulan Mutu dan Hari Standar Dunia merupakan ajang tahunan yang bersifat nasional dengan berbagai kegiatan standarisasi bernuansa pembinaan, informasi, promosi dan ilmiah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap "standar penilaian kesesuaian" yang berujung pada terciptanya masyarakat sadar mutu dan berbudaya standar. Standar Nasional Indonesia yang

kemudian disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.

Agar SNI memperoleh apresiasi dari *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO code of good practice*, yaitu:

- *Openness (keterbukaan)*: terbuka bagi semua *stakeholder*, agar semua yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- *Transparency (transparansi)*: transparan, agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Ini juga dimaksudkan agar para *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- *Consensus and impartiality (Konsensus dan tidak memihak)*: ini bertujuan agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- *Effectiveness and relevance (efektifitas dan relevansi)*: ini dimaksudkan agar dapat memfasilitasi perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Coherence (koherensi)*: ini dimaksudkan agar koheren dengan pengembangan standar internasional supaya perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional, dan;
- *Development dimension (berdimensi pembangunan)*: mempunyai dimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) wilayah Jawa Timur, Universitas Surabaya, PT. Semen Gresik, PT Garuda Food dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan promosi SNI dalam rangka memperingati Bulan Mutu Nasional 2009. Namun produk yang diberi label SNI mempunyai kekurangan, yaitu pada tulisan SNI yang relatif kecil, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk membacanya.

Pelaku industri kerajinan tangan di Jawa Timur mendukung dengan baik rencana standarisasi produk tersebut, akan tetapi di samping itu pemerintah juga diminta untuk memfasilitasi ketersediaan bahan baku lokal yang berkualitas dengan harga lebih murah. Abbas A.K, Manajer Jaringan Usaha Koperasi Jawa Timur, sebagai salah satu lembaga di bawah naungan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Jawa Timur, menilai rencana standarisasi kerajinan merupakan langkah positif guna meningkatkan daya saing di pasar, terutama sekali pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan barang yang beredar di pasaran dan juga sebagai salah satu bukti upaya pengamanan pasar dalam negeri. Tidak hanya mencegah kemungkinan masuknya barang yang substandar dari luar negeri, tetapi juga barang yang diproduksi di dalam negeri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional; Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa.

Pada tahun 2009, di tengah maraknya produk-produk yang mengandung melamin dan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Terbitnya peraturan perundangan ini berfungsi untuk menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.634/MPP/Kep/9/2002 yang menerangkan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar. Sedangkan pada tahun 2007 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.15/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.

Bagi importir dan juga distributor yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pembekuan terhadap izin impor dan SIUP. Selanjutnya untuk importir dan distributor tersebut diberikan waktu selama dua bulan sejak pemberian sanksi untuk

menarik barangnya dari pasaran. Apabila ini tidak dilakukan, maka akan diproses lebih lanjut secara hukum dengan konsekuensi yang lebih berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akan ditindak tegas. Peraturan seperti ini dibuat yang mana salah satunya bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku usaha.

Produk-produk yang mempunyai label SNI telah banyak beredar di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan dan juga telah memenuhi standar mutu serta kualitas yang telah ditentukan oleh BSN. Produk-produk SNI ini dapat mengamankan produk dalam negeri dari persaingan produk-produk luar negeri yang masuk. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BSN mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi, sehingga secara otomatis BSN juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan produsen dalam memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi produk-produk yang telah berstandar SNI; (2) Melakukan analisis terhadap kesesuaian produk tersebut apakah sudah layak mendapatkan standar SNI; (3) Memberikan rekomendasi produk-produk manakah yang benar-benar sesuai dengan status berstandar SNI dan produk-produk manakah yang masih kurang pantas menyandang status berstandar SNI.

METODE

Dalam penelitian ini terdapat dua langkah utama. Langkah pertama adalah menentukan produk-produk ber-SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan yang akan dinilai. Langkah kedua adalah melakukan penilaian terhadap produk ber-SNI yang telah ditentukan pada langkah pertama dengan metode survei. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan survei berupa kuesioner. Kuesioner terlebih dahulu diuji keandalan atau reliabilitas (*reliability*) pengukurannya. Dalam hal ini digunakan uji reliabilitas dengan teknik *Cronbach Alpha*. Begitu pula dengan data primer (jawaban responden) yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, harus diuji validitasnya. Dalam pengujian validitas data digunakan teknik korelasi *bivariate R pearson*.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana nilai kesesuaian produk-produk SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan. Komponen-komponen yang dinilai meliputi: persyaratan dengan pelayanan, kejelasan dan kepastian, kedisiplinan, tanggung jawab, keterbukaan, transparansi, konsensus dan tidak memihak, efektivitas dan relevansi, dan berdimensi pembangunan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penelitian ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu penentuan produk yang akan dinilai kesesuaiannya dengan SNI dan penilaian terhadap produk yang telah ditentukan tersebut. Setelah ditentukan produk yang akan dinilai, maka dilakukan penilaian dengan memberikan kuesioner kepada responden.

Responden di sini adalah produsen produk yang meliputi karyawan di bagian-bagian terkait. Responden pada 1 (satu) produk minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Komponen-komponen yang dinilai meliputi: Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan; Kejelasan dan kepastian; Kedisiplinan; Tanggung jawab; Keterbukaan (*openess*); Transparansi (*tranparency*); Konsensus dan tidak memihak (*consensus and impartiality*); Efektifitas dan relevansi (*effectiveness and relevance*); Koherensi (*coherence*); Berdimensi pembangunan (*development dimension*).

Kuesioner dibacakan oleh petugas survei dan direspon secara langsung oleh para responden. Petugas survei tidak mengizinkan para responden untuk mendekati proses survei. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas jawaban dari responden.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan *scoring* dan *entry* data. *Scoring* yang dilakukan adalah dengan memberi kode berupa angka (skor) pada jawaban yang telah diisi oleh responden dengan kategori:

Jawaban "a" diberi skor "1"

Jawaban "b" diberi skor "2"

Jawaban "c" diberi skor "3"

Jawaban "d" diberi skor "4"

Sedangkan *entry* data yang dilakukan adalah dengan cara memasukkan data hasil *scoring* tersebut

ke dalam tabulasi pada masing-masing unsur produk.

Analisis Data

Analisis data mencakup: (1) Refleksi indeks kesesuaian pada produk SNI; (2) Penjelasan dan interpretasi kualitatif dari hasil *Analisis Statistic Descriptive*, hasil pengujian kualitas data dan instrumen, dan refleksi indeks kesesuaian pada produk SNI.

HASIL

Produk yang Disurvei

Dari hasil pendataan, produk yang disurvei adalah sebagai berikut:

Produk non-makanan

- Pupuk kalium klorida SNI 02-2805-2005.
- Ban mobil penumpang SNI 06-0098-2002.
- Semen Portland campur SNI 15-3500-1994.
- Pupuk mono ammonium fosfat (MAP) SNI 02-2810-1992.
- Karet konvensional SNI 06-0001-1987.

Produk makanan

- Air minum dalam kemasan SNI 01-3553-1996.
- Tepung terigu sebagai bahan makanan SNI 01-3751-2000.
- Mi instan SNI 01-3551-2000.
- Garam konsumsi beryodium SNI 3556:2010.
- Gula Kristal putih (*plantation white sugar*) SNI 3140.3:2010.

Produk-produk di atas selanjutnya dinilai kesesuaiannya dengan SNI sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian berikutnya.

Statistik Deskriptif Produk Non-Makanan

Sebagai gambaran umum data yang diperoleh secara statistik, berikut ini disajikan hasil analisis statistik pada masing-masing produk non-makanan.

Berdasarkan deskripsi statistik, diketahui skor minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 4 pada semua unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif jawaban yang disediakan mendapat penilaian dari 450 responden, yaitu dari jawaban sangat negatif (skor 1) hingga yang sangat positif (skor 4).

Secara rinci, penjelasan dari data statistik pada Tabel 1.

Tabel 1. *Descriptive Statistics* Produk Non-Makanan

Unsur Pelayanan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	1	4	2.84	0.408
Kejelasan dan kepastian	450	1	4	2.77	0.476
Kedisiplinan	450	1	4	2.83	0.481
Tanggung jawab	450	1	4	2.85	0.466
Keterbukaan	450	1	4	2.82	0.467
Transparansi	450	1	4	2.79	0.481
Konsensus dan tidak memihak	450	1	4	2.82	0.475
Efektifitas dan relevansi	450	1	4	2.76	0.477
Koherensi	450	1	4	2.83	0.476
Berdimensi pembangunan	450	1	4	2.83	0.472
Valid N (listwise)	450				

Tabel 2. Kriteria Penilaian Standarisasi

No.	Rentang Skala	Kriteria Penilaian Standarisasi
1	1.00 – 1.74	Tidak sesuai/Tidak jelas/Tidak disiplin/Tidak bertanggung jawab/Tidak terbuka/Tidak transparan/Tidak adil/ Tidak efektif dan relevan/Tidak Koheren/Tidak berdimensi pembangunan
2	1.75 – 2.49	Kurang sesuai/Kurang jelas/Kurang disiplin/Kurang bertanggung jawab/Kurang terbuka/Kurang transparan/Kurang adil/Kurang efektif dan relevan/Kurang Koheren/Kurang berdimensi pembangunan
3	2.50 – 3.24	Sesuai/Jelas/Disiplin/Bertanggung jawab/Terbuka/Transparan/Adil/Efektif dan relevan/Koheren/Berdimensi pembangunan
4	3.25 – 4.00	Sangat sesuai/Sangat jelas/Sangat disiplin/Sangat bertanggung jawab/Sangat terbuka/Sangat transparan/Sangat adil/Sangat efektif dan relevan/Sangat Koheren/sangat berdimensi pembangunan

Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan

Nilai *statistic mean* dari unsur kesesuaian persyaratan dengan pelayanan adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan antara standar yang ditetapkan dengan kualitas produk yang memiliki SNI sudah sesuai.

Kejelasan dan Kepastian

Nilai *statistic mean* dari unsur kejelasan dan kepastian petugas adalah 2,77. Artinya rata-rata responden menyatakan adanya standar yang jelas dan pasti dalam penetapan produk SNI.

Kedisiplinan

Nilai *statistic mean* dari unsur kedisiplinan sebesar 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen memiliki sikap disiplin dalam mengontrol kualitas produksi.

Tanggung Jawab

Nilai *statistic mean* dari unsur tanggung jawab petugas sebesar 2,85. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang telah dikeluarkannya.

Keterbukaan

Nilai *statistic mean* dari unsur keterbukaan adalah 2,82. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa semua *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan dalam prosesnya berjalan terbuka.

Transparansi

Nilai *statistic mean* dari unsur transparansi 2,79. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat mengikuti perkembangan

SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dengan nilai 2,79 tersebut juga menandakan bahwa *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh informasi yang berkaitan dengan SNI dan dapat memperoleh transparansi.

Konsensus dan tidak memihak

Nilai *statistic mean* dari unsur konsensus dan tidak memihak sebesar 2,82. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

Efektifitas dan relevansi

Nilai *statistic mean* dari unsur efektifitas dan relevansi sebesar 2,76. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan bahwa terdapat fasilitas untuk melakukan perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya fasilitas yang sudah ada efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Koherensi

Nilai *statistic mean* dari unsur koherensi sebesar 2,83. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan kesepakatannya dengan penerapan standarisasi produk. Ini dimaksudkan supaya perkembangan pasar negara Indonesia tidak terisolasi dengan perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan

internasional. Dengan nilai angka di atas, maka penerapan standarisasi dinilai responden sudah koheren.

Berdimensi pembangunan

Nilai *statistic mean* dari unsur berdimensi pembangunan sebesar 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa penerapan standarisasi berdimensi pembangunan agar mementingkan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Statistik Deskriptif Produk Makanan

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif sebagai gambaran umum data pada masing-masing produk makanan.

Berdasarkan deskripsi statistik, diketahui skor minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 4 pada unsur pelayanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada alternatif jawaban yang disediakan ternyata mendapat penilaian dari 450 responden, dari jawaban sangat negatif (skor 1) hingga yang sangat positif (skor 4).

Beberapa hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan

Nilai *statistic mean* dari unsur kesesuaian persyaratan dengan pelayanan adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan antara standar yang

Tabel 3. *Descriptive Statistics* Produk Makanan

Unsur Pelayanan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	1	3	2.84	0.368
Kejelasan dan kepastian	450	1	4	2.83	0.397
Kedisiplinan	450	1	3	2.83	0.374
Tanggung jawab	450	2	3	2.84	0.368
Keterbukaan	450	1	3	2.81	0.371
Transparansi	450	1	4	2.64	0.365
Konsensus dan tidak memihak	450	1	4	2.75	0.367
Efektifitas dan relevansi	450	1	3	2.69	0.372
Koherensi	450	1	4	2.76	0.373
Berdimensi pembangunan	450	1	4	2.81	0.380
Valid N (listwise)	450				

ditetapkan dengan kualitas produk makanan yang memiliki SNI sudah sesuai.

Kejelasan dan Kepastian

Nilai *statistic mean* dari unsur kejelasan dan kepastian petugas adalah 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan adanya standar yang jelas dan pasti dalam penetapan produk makanan yang mempunyai label SNI.

Kedisiplinan

Nilai *statistic mean* dari unsur kedisiplinan adalah 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen memiliki sikap disiplin dalam mengontrol kualitas produksi.

Tanggung Jawab

Nilai *statistic mean* dari unsur tanggungjawab petugas adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang telah dikeluarkannya.

Keterbukaan

Nilai *statistic mean* dari unsur keterbukaan sebesar 2,81. Artinya yang berkepentingan dalam pengembangan SNI dinilai responden terbuka.

Transparansi

Nilai *statistic mean* dari unsur transparansi sebesar 2,64. Artinya semua *stakeholder* yang mengikuti pengembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya dinilai transparan. Adanya transparansi ini juga dimaksudkan agar para *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

Konsensus dan tidak memihak

Nilai *statistic mean* dari unsur konsensus dan tidak memihak sebesar 2,75. Artinya responden menyatakan ada rasa adil ketika *stakeholder* melakukan kepentingannya.

Efektifitas dan relevansi

Nilai *statistic mean* dari unsur efektifitas dan relevansi sebesar 2,69. Artinya pemberian fasilitas perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai efektif dan relevan.

Koherensi

Nilai *statistic mean* dari unsur koherensi sebesar 2,76. Artinya pengembangan standarisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pasar negara Indonesia dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional dinilai oleh responden koheren.

Berdimensi pembangunan

Nilai *statistic mean* dari unsur berdimensi pembangunan sebesar 2,81. Artinya penerapan standarisasi nasional yang terkait dengan aspek kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dinilai oleh responden memiliki dimensi pembangunan.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Opini Publik terhadap Produk SNI

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif (*descriptive statistics*) sebagai gambaran umum data tentang opini publik terkait dengan produk yang memiliki label SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan.

Pengujian Kualitas Instrumen dan Data

Dari hasil uji reliabilitas diketahui variabel kesesuaian produk SNI di produk non-makanan memiliki *Cronbach Alpha* sebesar $0.835 > 0.60$ dan di produk makanan memiliki *Cronbach Alpha* sebesar $0.863 > 0.60$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen (kuesioner) yang dipergunakan dalam survei ini dapat diandalkan (reliabel) untuk mengukur kesesuaian produk SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan.

Tabel 4. Reliabilitas Instrumen Survei

VARIABEL	UNSUR	CRONBACH ALPHA	KESIMPULAN
KESESUAIAN	PRODUK NON-MAKANAN	0,835	RELIABEL
PRODUK SNI	PRODUK MAKANAN	0,863	RELIABEL

Tabel 5. Validitas Data Pada Produk Non-Makanan

Unsur	N	Koefisien R Pearson	Sig.	Kesimpulan
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	0.544**	0.000	Valid
Kejelasan dan kepastian	450	0.567**	0.000	Valid
Kedisiplinan	450	0.616**	0.000	Valid
Tanggung jawab	450	0.656**	0.000	Valid
Keterbukaan	450	0.561**	0.000	Valid
Transparansi	450	0.563**	0.000	Valid
Konsensus dan tidak memihak	450	0.631**	0.000	Valid
Efektifitas dan relevansi	450	0.591**	0.000	Valid
Koherensi	450	0.621**	0.000	Valid
Berdimensi pembangunan	450	0.653**	0.000	Valid

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 6. Validitas Data Pada Produk Makanan

Unsur Pelayanan	N	Koefisien R Pearson	Sig.	Kesimpulan
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	0.644**	0.000	Valid
Kejelasan dan kepastian	450	0.568**	0.000	Valid
Kedisiplinan	450	0.725**	0.000	Valid
Tanggung jawab	450	0.697**	0.000	Valid
Keterbukaan	450	0.721**	0.000	Valid
Transparansi	450	0.671**	0.000	Valid
Konsensus dan tidak memihak	450	0.835**	0.000	Valid
Efektifitas dan relevansi	450	0.782**	0.000	Valid
Koherensi	450	0.832**	0.000	Valid
Berdimensi pembangunan	450	0.759**	0.000	Valid

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Dari hasil uji validitas di atas, diketahui semua unsur pelayanan (empat unsur) memiliki taraf signifikansi di bawah 1% (ditandai dengan **). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data jawaban responden pada masing-masing unsur dinilai valid karena mencerminkan kesesuaian atas kualitas produk yang mempunyai SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan.

Dari hasil uji validitas di atas, diketahui memiliki signifikansi di bawah 1% (ditandai dengan **). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data jawaban responden pada masing-masing unsur dinilai valid karena mencerminkan kesesuaian atas kualitas produk yang mempunyai SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan.

Tabel 7. Refleksi Kesesuaian SNI di Jawa Timur 2007 – 2010

No.	Unsur	Nilai Kesesuaian SNI			
		Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009	Th. 2010
1.	Pupuk Kalium Klorida	74.96 (B)	64.18 (B)	66.56 (B)	67.57 (B)
2.	Ban Mobil Penumpang	74.88 (B)	61.35 (C)	62.58 (B)	70.11 (B)
3.	Semen Portland Campur	74.92 (B)	64.53 (B)	64.01 (B)	65.00 (B)
4.	Pupuk Mono Ammonium Fosfat	74.47 (B)	59.94 (C)	64.87 (B)	64.61 (B)
5.	Karet Konvensional	75.64 (B)	65.25 (B)	65.29 (B)	73.91 (B)
6.	Air Minum Dalam Kemasan	75.28 (B)	64.81 (B)	67.70 (B)	67.79 (B)
7.	Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan	75.45 (B)	63.36 (B)	63.31 (B)	64.27 (B)
8.	Mi Instan	73.02 (B)	66.50 (B)	66.50 (B)	72.74 (B)
9.	Garam Konsumsi Beryodium	75.62 (B)	65.62 (B)	65.60 (B)	61.76 (C)
10.	Gula Kristal Putih	75.12 (B)	60.35 (C)	68.68 (B)	64.66 (B)

Nilai Kesesuaian SNI

Sebagai bahan perbandingan pelaksana survei melakukan analisa kesesuaian SNI yang dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2007–2010.

Selama tahun 2007–2010 diketahui nilai kesesuaian produk berstandar SNI di Jawa Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2006, Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI pada tahun 2006 masuk dalam katregori ”baik”. Kondisi dalam kategori ”baik” ini tetap berlanjut sampai pada tahun 2010, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2008.

Dari kondisi di atas, meskipun pada tahun 2008 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun-tahun setelah itu indeks kesesuaian mengalami peningkatan terus menerus. Ini menandakan bahwa produk yang memiliki label SNI terdapat peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Dari data di atas diketahui bahwa pada tahun 2010 nilai tertinggi adalah karet konvensional dengan angka 73.91, sedangkan yang terendah adalah garam konsumsi beryodium dengan angka 61.76. Secara umum indeks kesesuaian SNI pada tahun 2010 masih di bawah indeks kesesuaian SNI tahun 2007 dengan selisih angka 6.74 dari tahun 2007.

Secara umum nilai kesesuaian dari semua komponen yang seperti disebut di atas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terkecuali pada tahun dari tahun 2007 ke 2008. Kondisi menurunnya rata-rata

nilai kesesuaian ini mungkin saja di sebabkan karena adanya krisis global yang terjadi di tahun 2008. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa himbauan. Di antaranya adalah meningkatkan produksi dalam negeri dan juga memanfaatkan peluang perdagangan nasional. Maka kemudian hasilnya dapat kita lihat satu tahun berikutnya dengan meningkatnya nilai kesesuaian produk SNI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat kriteria yang jelas dalam penentuan produk SNI, dan informasi yang didapatkan oleh pihak yang berkepentingan dapat diakses dengan mudah. Kemudahan akses informasi ini yang kemudian menyebabkan banyak produsen atau pihak yang berkepentingan mengurus standarisasi produk mereka;
- Pada survei produk non-makanan dan produk makanan, semua responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan terbuka. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,82, sedangkan pada produk makanan 2,81.
- Terdapat transparansi dalam pengembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan

sampai ke tahap penetapannya. Manfaat dari transparansi ini bagi pihak yang berkepentingan adalah mudahnya mengakses semua informasi yang berkaitan dengan SNI. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,79 dan pada produk makanan didapat angka sebesar 2,64.

- Rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,82 dan pada produk makanan didapat angka sebesar 2,75. Dari keduanya, yang sangat rendah nilainya adalah pada produk makanan. Ini menandakan bahwa produk makanan yang berlabel SNI belum begitu menjadi prioritas pilihan masyarakat ketika berbelanja;
- Fasilitas perdagangan yang disediakan pemerintah dalam rangka standarisasi nasional dinilai efektif dan relevan. Pada produk non-makanan didapat nilai 2,76 dan pada produk makanan didapat nilai 2,69. Dari keduanya, nilai terendah adalah pada produk makanan. Hal ini mengartikan fasilitas yang disediakan pemerintah pada produk makanan masih rendah dibandingkan dengan yang lain;
- Terdapat keterhubungan dalam pengembangan standarisasi nasional. Ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Pada kedua jenis produk yang disurvei terdapat angka sebesar 2,83 pada produk non-makanan dan 2,76 pada produk makanan;
- Program standarisasi nasional yang juga memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional juga dinilai oleh responden memiliki dimensi pembangunan. Pada produk non-makanan terdapat angka 2,83 dan pada produk non-makanan terdapat angka 2,81;
- Terjadi peningkatan Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI dari tahun 2008–2010, meskipun pada rentang tahun 2007–2008 mengalami penurunan;
- Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Malang, Gresik, Blitar, Tulungagung, dan Pasuruan dilihat dari data statistik yang tersaji secara umum tergolong dalam kategori "baik". Artinya produk-produk tersebut memiliki kesesuaian

antara persyaratan untuk mendapatkan label SNI dengan kondisi produk di lapangan;

- Produk-produk yang telah di survei, merujuk pada hasil data statistik, memang pantas untuk mendapatkan label SNI dari pihak terkait.

Saran

Berdasarkan data survei, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Nilai kesesuaian pada produk non-makanan yang terendah ada pada aspek kejelasan dan kepastian. Pada produk makanan ada pada aspek kesesuaian. Artinya pada produk makanan kesesuaian antara persyaratan SNI dengan kualitas produk belum cukup tinggi. Hal ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah dengan cara memperketat lagi pemberian SNI bagi para produsen yang bergerak dalam bidang makanan;
- Peningkatan angka indeks kesesuaian SNI dari tahun ke tahun haruslah terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan produk-produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri;
- Perlu adanya kemudahan bagi produsen dalam negeri untuk memperoleh standarisasi produk SNI, sehingga timbul dampak menguatnya usaha-usaha dalam negeri;
- Produk makanan mendapatkan angka yang rendah hampir di semua unsur, meskipun masih sama kategorinya dengan kedua komponen yang lain. Melihat kondisi seperti ini, maka pemerintah perlu lebih menitikberatkan proses standarisasi nasional dalam produk makanan tanpa mengurangi keseriusannya dalam menangani produk-produk yang lain;
- Pemberian label SNI pada produk-produk dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri yang sekarang ini membanjiri Indonesia. Artinya setiap produk dalam negeri harus mempunyai standarisasi SNI. Apalagi kondisi ini ditambah lagi dengan pasar bebas yang telah mulai diterapkan kebijakannya di Indonesia;
- Menyikapi perdagangan bebas yang telah diterapkan kebijakannya di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pembinaan

terhadap produk-produk dalam negeri agar kualitasnya semakin bisa bersaing dengan produk luar negeri, sehingga perekonomian rakyat bisa semakin membaik dari hari ke hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulwahab, S. 1999. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amstrong, M. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Handoko, H. 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, M.I. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan.
- Islamy, M.I. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, H.H. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Ratminto, & Atik, S.W. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S.P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjamsuddin, S. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Stocker, G. 1966. *Kepemerintahan sebagai Teori: Lima proposisi*, Materi Kuliah PPSUB, Malang.
- Stoner, James, A.F., dan R. Edward, F. 1992. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Terry, G.R. 1991. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Widodo, J. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.
- Kumpulan Tulisan Mahasiswa Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya. 2001. Tidak diterbitkan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa.
- Peraturan Menteri Perindustrian No.15/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.
- Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 571/KEPI/BSN/161/2009 tentang Penetapan 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 03/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 2 (Dua) Amandemen Standar Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 04/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia.
- Distribusi Jumlah Perusahaan Pengguna SNI Menurut Propinsi*. Badan Standardisasi Nasional Tahun 2008.
- Distribusi Perusahaan yang Tidak Menggunakan SNI dan SI*. Badan Standardisasi Nasional Tahun 2008.
- Hasil Survey Penilaian Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur 2007-2010*. Badan Standardisasi Nasional 2010.
- WTO code of good practice*. WTO.
- Penerapan SNI di berbagai produk sumbang 3,61% PDB*. kabarbisnis.com. 12 November 2010. Diunduh 5 Februari 2011.